

**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar
Kecamatan Tahuna**

Susanti Alfira Takaluhude¹

Ronny Gosal²

Ventje Kasenda³

ABSTRAK

Jumlah sampah yang tidak terkontrol dan semakin banyak jumlah masyarakat yang semakin bertambah, namun tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan yang masih sangat kurang mengakibatkan ketidak seimbangan keadaan lingkungan. Kegiatan penanganan sampah belum mampu menangani semua sampah yang dihaliskan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tipe A adalah instansi teknis yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pengelolaan sampah yaitu di Bidang Persampahan. Dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi. Dengan menggunakan teori implementasi dari George Edward III dalam Widodo (2010 : 96), terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna, belum terlaksana secara optimal. Komunikasi yang dilakukan belum optimal, sumber daya manusia maupun anggaran masih terbatas, disposisi adanya ketidak serasian antara pelaksanaan program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dengan yang ada di Kelurahan. Namun struktur birokrasinya terkoordinasi dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedurnya (SOP) yang ada.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia yang ikut mengalami masalah persampahan, dimana kondisi timbunan sampah di cukup memprihatinkan. Jumlah pertahun produksi sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan mencapai 25.41532 ton. Sampai saat ini angka tersebut merupakan estimasi atau perhitungan perkiraan, karena untuk menghitung volume atau berat sampah harus menggunakan timbangan dan alat, yang sampai saat ini belum ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Sumber data dari beritanusantara.co.id). Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hanya ada di kota Tahuna yang terletak di Kelurahan Penanekeng Kecamatan Tahuna Barat. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat pembuangan sampah yang telah diangkut dari tempat pembuangan sementara.

Melihat fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang adalah sebagai tempat paling akhir untuk pembuangan sampah tentunya lokasi yang ada tidak akan dapat menampung sampah yang setiap tahunnya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meluasnya kawasan pemukiman di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan demikian perlu adanya pengelolaan yang baik, dan bisa dimanfaatkan sehingga dapat mengurangi volume sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan

penanganan sampah. Secara umum ada beberapa peraturan yang mengatur Pengelolaan sampah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.
2. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan & strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada Bank sampah.
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 tahun 2019 tentang strategi dan kebijakan Sulawesi Utara dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Di Kabupaten Kepulauan Sangihe peraturan yang digunakan dalam pengelolaan sampah yaitu Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe No 39 Tahun 2018 tentang strategi dan kebijakan Kabupaten kepulauan Sangihe dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tipe A adalah instansi teknis yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pengelolaan sampah yaitu di Bidang Persampahan.

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe No 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencapai tujuan pengelolaan persampahan agar lebih optimal. Peraturan bupati tersebut menjamin adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Namun masih ditemukan berbagai kendala dalam pengelolaan sampah seperti tempat penampungan sampah yang tersedia masih kurang, masih terdapat sampah di area yang seharusnya tidak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah seperti di sungai, laut, keterlambatan petugas kebersihan dalam mengangkut sampah.

Hal ini perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui instansi Teknis yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Disamping itu implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang baik itu harus didukung oleh beberapa faktor seperti harus adanya komunikasi yang baik antara para pelaksana kebijakan, sumber daya yang tersedia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, adanya

kepatuhan dari tiap pelaksana kebijakan serta pembagian kerja yang merata atau sesuai dengan bagian-bagian yang akan dikerjakan berdasarkan keahlian para pelaksana yang ada. .

Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain, yang serupa dan memiliki tujuan yang sama dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa jurnal yang mempunyai fokus yang tidak berbeda jauh dengan fokus penelitian yang penulis ambil diantaranya :

1. Yulianto. Mokodompis 2019, *"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado"*.

Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Jurnal ini memiliki persamaan dimana penelitian yang dibahas adalah tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di kota Manado sedangkan penelitian penulis adalah implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe.

2. Tiarasary Dhiharcristiani Batahari 2020, *"Manajemen Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)"*.

Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Jurnal ini memiliki persamaan dimana penelitian yang dibahas adalah tentang pengelolaan sampah. Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang manajemen pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sangihe, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sangihe.

3. Agnes Fitria Widiyanto 2017, *“Model Pengelolaan Sampah RumahTangga Di Kabupaten Banyumas”*.

Jurnal Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Jurnal ini memiliki persamaan dimana penelitian yang dibahas adalah tentang pengelolaan sampah. Perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada model pengelolaan sampah rumah tangga dengan tempat penelitian di Banyumas, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan bertempat di Kabupaten Sangihe.

Konsep Implementasi

Horn (Tahir, 2014:55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Sementara dari sudut pandang *target groups*, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola

hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”. Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, salah satunya model implementasi menurut George Edward III dalam Widodo (2010 : 96) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu :

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

b. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010 : 98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi :

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010 : 98)

menyatakan bahwa “ Mungkin sumberdaya yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf”. Edward III dalam Widodo (2010 : 98) menambahkan “ Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten urutan implementasi dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumberdaya untuk melakukan pekerjaan efektif, implementasi tidak akan efektif “.

2. Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010 : 100) menyatakan dalam kesimpulan studinya, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010 : 100) menyatakan bahwa terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

Edward III dalam Widodo (2010 : 101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3. Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010 : 102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam

memberikan pelayanan dalam implemmentasi kebijakan.

4. Sumberdaya Kewenangan

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 103) menyatakan bahwa : Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010 : 103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 104) dikatakan sebagai “ kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan ”. Edward III dalam Widodo (2010 : 104-105) mengatakan bahwa : Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Widodo (2010 : 106) menyatakan bahwa “

implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi". Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Edward III dalam Widodo (2010 : 107) menyatakan bahwa : Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Berdasarkan model implementasi menurut George Edward III dalam Widodo (2010 : 96) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu :

a) Komunikasi

Melihat kemampuan dinas dalam hal mengkomunikasikan atau dalam hal penyampaian kebijakan apakah dapat tersampaikan atau dapat dipahami dengan benar oleh para anggota dinas terkait maupun masyarakat.

b) Sumber Daya

Melihat sumber daya yang diperlukan dalam pengimplementasian kebijakan pengolahan sampah apakah telah terpenuhi atau masih ada kekurangan dalam hal sumber daya,

baik sumber daya manusianya, anggarannya maupun ketersediaan fasilitasnya serta kewenangan.

c) Disposisi

Melihat sejauh mana kepatuhan para pelaku kebijakan terkait dalam melaksanakan setiap isi kebijakan atau hanya sebagian isi dari kebijakan saja yang dilakukan atau terlaksana sesuai dengan yang ditentukan dalam kebijakan. Serta melihat kepatuhan dari masyarakat itu sendiri dalam hal penanganan sampah.

d) Struktur Birokrasi

Melihat keteraturan dalam pembagian tugas apakah pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan posisi yang diberikan. Serta apakah para petugas kebersihan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diberikan.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
2. Sekretaris Camat Tahuna
3. Sekretaris Lurah Sawangbendar
4. 2 Orang Petugas Kebersihan (Petugas pengangkut sampah yang diwawancarai)
5. 2 Orang Masyarakat

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti membahas hasil penelitian dengan menggunakan teori dari George Edward III dalam Widodo (2010 : 96) yang terbagi dalam empat (4) kriteria utama penilaian yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi : Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi

mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Salah satu variabel penting yang memengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi atau suatu kebijakan. Dari hasil wawancara menurut analisa peneliti, komunikasi yang terjalin masih kurang baik, dimana masih terdapat berbagai keluhan yang muncul salah satunya mengenai petugas pengangkut sampah, otomatis jika masih ditemukan keluhan maka tentu komunikasi yang dilakukan masih belum optimal. Dimana hanya bagian kecamatan dan kelurahan yang melakukan komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup secara optimal sedangkan dengan bagian lain seperti petugas pengangkut sampah tidak begitu, seharusnya komunikasi yang dilakukan sama rata atau seimbang baik dengan camat dan lurah begitupun dengan para petugas pengangkut sampah karena mereka yang turun langsung ke lapangan melaksanakan tugas dalam rangka pengelolaan sampah. Jadi komunikasi itu sangat diperlukan agar tugas yang dilakukan tepat atau sesuai dengan sasaran yang diatur atau ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih belum optimal karena hanya sebagian pihak.

2. Sumber Daya : Edward III dalam Widodo (2010 : 98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan

penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 98) bahwa sumberdaya tersebut. Jika dihubungkan dengan kebijakan, sumber daya adalah faktor kunci bagi pelaksana kebijakan. Sumberdaya ini pun terdiri dari beberapa kriteria yaitu : Sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan dari wawancara, mengenai sumber daya baik dari segi sumber daya manusianya maupun anggarannya sudah terpenuhi tapi disamping itu ada harapan dari Dinas Lingkungan Hidup akan adanya perubahan jumlah anggaran yang diberikan. Karena seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana sejauh ini anggaran hanya cukup untuk ibu kota Kabupaten dan didalamnya hanya ada 3 (tiga) Kecamatan. Sedangkan sumber daya peralatannya berupa perlengkapan yang digunakan oleh para petugas pengangkut sampah dalam melaksanakan tugas juga banyak menuai keluhan seperti usia kendaraan pengangkut sampah yang sudah lama sehingga mengakibatkan seringnya terjadi kerusakan dan tentu saja dalam hal ini adanya penggunaan anggaran dan kadangkala pun jumlah anggaran yang ada kurang untuk membiayai kerusakan dari kendaraan dan hal ini pun menjadi masalah tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup.

Dari pihak petugas pengangkut sampah juga muncul keluhan seperti peralatan yang mereka gunakan untuk melakukan

tugas masih belum sepenuhnya ada atau masih belum lengkap. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur).

Oleh karena itu sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. Namun jika dilihat di struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup ada posisi yang kosong yang belum terisi yaitu di bagian seksi pemantauan lingkungan. Hal ini patut diperhatikan karena posisi ini sangat dibutuhkan jika melihat kondisi lingkungan dan seharusnya ada staf atau orang yang harus segera mengisi posisi tersebut mengingat tugas dari seksi pemantauan lingkungan ini sangat dibutuhkan. Begitupun dengan sumber daya anggaran yang merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan terjadinya perpindahan tujuan yang dilakukan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Seperti yang dikatakan Dinas Lingkungan Hidup bahwa anggaran yang ada masih terbilang minim dan karena hal tersebut pula sehingga dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri berharap adanya perubahan jumlah anggaran. Dari data yang diperoleh melalui wawancara ternyata masih banyak keluhan yang

muncul dari segi sumber daya dalam hal anggaran dan perlengkapan petugas pengangkut sampah. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Tapi dari segi sumberdaya kewenangan para pelaku kewenangan sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan setiap kebijakan, kewenangan ini pun sering juga digunakan dalam perundingan untuk menyelesaikan permasalahan baik oleh petugas pengangkut sampah dalam hal melaksanakan tugas maupun dinas terkait dalam menyusun program untuk pengelolaan sampah.

Maka analisa peneliti dari melihat data yang ada selama ini masalah persampahan yang masih belum kunjung tertangani dengan baik salah satu penyebabnya yaitu dari segi sumber dayanya dimana masih ada kekurangan baik anggarannya, perlengkapan petugas persampahannya yang mengakibatkan kegiatan pengelolaan sampah berjalan dengan tidak optimal.

3. Disposisi : Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 104) dikatakan sebagai “ kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan ”. Edward III dalam Widodo (2010 : 104-105) mengatakan bahwa : Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka

juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Petugas kebersihan dalam hal ini baik petugas penyapu jalan maupun petugas pengangkut sampah telah melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditentukan atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun tentu jika cuaca tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas seperti saat musim hujan para petugas kebersihan tidak dapat melaksanakan tugas dengan optimal karena terhalang cuaca, banyak sampah yang ikut hanyut dibawah aliran air terlebih saat terjadi banjir, kadangkala wilayah atau lokasi yang sudah dibersihkan kembali menjadi kotor akibat dari luapan air yang ada di selokan dan sampah-sampah yang ada diselokan ikut hanyut sehingga kembali mengotori lokasi yang tadinya telah dibersihkan oleh petugas kebersihan.

Kadangkala pula petugas kebersihan yang mengangkat sampah (petugas pengangkut sampah) kesulitan dalam mengangkat sampah karena sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sementara (TPS) oleh masyarakat tidak dipilah berdasarkan jenisnya, bahkan sampah yang seharusnya tidak dibuang ketempat pembuangan sementara (TPS) seperti seng bekas, batang pohon, ikut dibuang sehingga menyulitkan para petugas pengangkut sampah, dan mau tidak mau mereka pun harus ikut mengangkut sampah-sampah tersebut padahal itu merupakan kewajiban dari masyarakat untuk membawa langsung ke tempat pemrosesan akhir (TPA) namun di sisi lain pun jika tidak ikut diangkut oleh petugas pengangkut sampah nantinya akan

menumpuk sehingga tempat pembuangan sementara (TPS) menjadi penuh.

Namun adapula hambatan dalam pelaksanaan program maupun kebijakan. Seperti baru-baru ini akibat pandemi covid-19 sehingga ada beberapah kegiatan yang pelaksanaannya tertunda karena adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan kegiatan terutama yang melibatkan banyak orang hal ini pun memengaruhi jumlah anggaran yang dikeluarkan. Namun disisi lain peneliti memperoleh informasi dari pihak kecamatan Tahuna bahwa program bank sampah yang ada di kelurahan baik yang ada di kelurahan Sawang Bendar maupun kelurahan lain yang ada di Kecamatan Tahuna sudah tidak lagi dijalankan atau dilaksanakan.

Bank sampah merupakan program pengelolaan sampah yang ada di tiap kelurahan di Kecamatan Tahuna.

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Program bank sampah adalah suatu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah ditingkat masyarakat, dengan menyamakan kedudukan sampah serupa dengan uang atau barang yang berharga yang dapat ditabung. Masyarakat dididik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilai sehingga mereka mau memilah sampah.

Dari data yang ada peneliti menganalisa bahwa adanya ketidakserasian antara pelaksanaan program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dengan yang ada di kelurahan. Dimana jika sesuai pernyataan dari pihak dinas bahwa mereka telah melaksanakan program dengan baik tapi di satu sisi program

yang ada di kelurahan ada yang tidak lagi dilaksanakan. Seharusnya dari dinas sendiri harus turun langsung untuk memeriksa serta memastikan setiap program yang ada apakah terlaksana di dinas saja atau kelurahan saja atau tidak keduanya, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan setiap program yang dibuat sehingga anggaran yang diberikan untuk program tersebut juga tidak terbuang sia-sia dimana anggaran telah diberikan namun hal yang dianggarkan tidak dijalankan dengan semestinya.

4. Struktur Birokrasi : Edward III dalam Widodo (2010 : 106) menyatakan bahwa “ implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Untuk pembagian tugas dari petugas kebersihan itu sendiri untuk petugas kebersihan yang bertugas menyapu jalan diatur oleh kelurahan dan tiap komplek perumahan warga yang letaknya jauh dari jalanraya atau yang berada di lorong, kelurahan menyediakan kendaraan roda 3 khusus untuk mengangkut sampah. Dan untuk petugas kebersihan yang bertugas mengangkut sampah itu diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup. Setiap petugas pengangkut sampah dibagi menjadi beberapah kelompok dan setiap kelompok mempunyai rute berbeda sesuai dengan pembagian. Seperti setiap satu kelompok bertugas mengangkut sampah diwilayah yang ada dikelurahan Sawang Bendar, dan wilayah lain adalah tugas dari

kelompok petugas pengangkut sampah yang lain untuk mengangkut sampah yang ada. Selanjutnya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa pembagian kerja, wewenang, maupun tanggungjawab, yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan atau dibuat sesuai dengan prosedur operasi yang standar atau biasa disebut dengan *Standart Operating Procedures* (SOP).

Untuk pembagian kerja dirapkan sesuai dengan *Standart Operating Procedures* (SOP) yang sudah ada. *Standart Operating Procedures* (SOP) adalah suatu alur/cara kerja yang sudah terstandarisasi dan memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. *Standart Operating Procedures* (SOP) ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya.

Standart Operating Procedures (SOP) sangat diperlukan untuk menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan pelayanan publik. Selain itu SOP juga akan memberikan kepastian hukum bagi pegawai dalam setiap pelaksanaan tugas mereka. SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Adapun pelimpahan tugas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan Kelurahan yang ada di kecamatan Tahuna dimana berkat koordinasi sehingga dulunya semua petugas kebersihan adalah tanggungjawab dari Dinas Lingkungan Hidup tapi berkat koordinasi dengan kelurahan maka

sekarang para petugas kebersihan baik itu penyapu jalan, petugas pengangkut sampah dalam hal ini kendaraan roda 3 dilimpahkan ke kelurahan dan kini telah menjadi tanggungjawab dari setiap kelurahan dalam mengatur. Kelurahan ikut membantu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Maka dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa dalam struktur birokrasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup pembagian kerja maupun pengaturan setiap posisi sesuai dengan keahlian dan cara kerja sudah baik dimana sudah ada standar operasional prosedurnya yang menjamin setiap aturan mengenai pembagian kerja maupun wewenang yang diberikan karena telah diatur secara terperinci dan jelas dalam standar operasional prosedur yang sudah ada di dinas.

Peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Akan tetapi pengelolaan sampah ini juga menjadi tugas dari masyarakat sebagai wadah pelaksanaan setiap program persampahan dari pemerintah. Masyarakat diajak berpartisipasi pada seluruh kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan baik dari tingkat kecamatan maupun kelurahan atau dengan kata lain setiap masyarakat mengelola sampah secara mandiri.

Dengan pola *Reduce, Reuse, Recycle* (mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali) atau disingkat dengan 3R, diharapkan

sampah yang dibuang bisa diminimalisir. Karena seperti yang ditemui dilapangan kebanyakan juga kendala pelaksanaan program pengelolaan sampah datangnya dari masyarakat seperti masih banyak masyarakat yang masih belum paham dengan memilah jenis-jenis sampah, membuang sampah sembarangan.

“ *Masyarakat membuang sampah spesifik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sehingga membuat petugas pengangkut sampah kebingungan dalam memilah sampah* ”, (wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, 19 April 2022).

Dan perlu diketahui bahwa yang diluar sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga itu masyarakat yang harus membawanya sendiri ke tempat pemrosesan akhir (TPA) karena sesuai dengan ketentuan sampah diluar jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga itu menjadi tanggungjawab masyarakat untuk membawanya ke TPA.

Seperti seng bekas, bongkahan bangunan, dan lainnya yang tidak termasuk dalam jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Tapi pada kenyataannya masyarakat tidak melaksanakan hal tersebut dan membiarkan sampah yang tak termasuk dalam sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga itu di trotoar, di tempat pembuangan sementara (TPS), dipinggiran jalan dan mau tidak mau para petugas pengangkut sampah ikut mengangkut sampah itu.

Padahal uang untuk biaya bahan bakar kendaraan pengangkut sampah sudah ada target atau ketentuan jumlahnya berapa banyak perminggu.

Dan karena ulah masyarakat ini kadangkala uang yang telah ditentukan jumlahnya sering kurang karena kendaraan pengangkut sampah ikut mengangkut juga sampah yang seharusnya jadi kewajiban atau tugas dari masyarakat untuk membawa langsung sampah tersebut yang tidak termasuk dalam jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga itu ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Dan akibat ulah masyarakat juga yang kadang membuat para petugas kebersihan kewalahan dalam membersihkan sampah yang berserakan dimana-mana.

Adapun masyarakat yang membuang sampah diluar tong sampah yang disediakan, bukan membuang sampah kedalam tempat sampah tapi dibiarkan diluar tempat sampah yang ada.

Penutup

Kesimpulan

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tergolong kurang optimal. Baik tapi masih kurang optimal dimana hanya bagian kecamatan dan kelurahan yang melakukan komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup secara rutin sedangkan dengan bagian lain seperti petugas pengangkut sampah tidak begitu.
2. Sumber daya, anggaran yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan perihal pengelolaan sampah dimana anggaran yang

tersedia hanya cukup untuk 3 kelurahan yang ada di kecamatan Tahuna, perlengkapan petugas pengelola sampah masih kurang seperti masker, sarung tangan. Kendaraan pengangkut sampah yang sudah tua sehingga sering mengalami kerusakan, dibagian sumber daya manusianya dimana masih ada posisi yang kosong dibagian seksi pemantauan lingkungan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup padahal posisi tersebut juga memegang peran penting dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

3. Disposisi dimana adanya ketidakserasian antara pelaksanaan program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dengan yang ada di kelurahan dari pihak dinas telah melaksanakan program dengan baik tapi di satu sisi program yang ada di kelurahan ada yang tidak lagi dilaksanakan.
4. Struktur birokrasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup pembagian kerja maupun pengaturan setiap posisi sesuai dengan keahlian dan cara kerja sudah baik dimana sudah ada standar operasional prosedurnya yang menjamin setiap aturan mengenai pembagian kerja maupun wewenang yang diberikan karena telah diatur secara terperinci dan jelas dalam standar operasional prosedur yang sudah ada.

Saran

1. Perlu adanya pembentukan sistem informasi yang baik dan penguatan keterlibatan kelompok masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

2. Perlu adanya penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran, serta penguatan sumber daya manusianya.
 3. Hubungan komunikasi yang baik dan adanya sumber daya baik anggaran, peralatan yang terpenuhi agar disposisi/kepatuhan para pelaku kebijakan juga ikut meningkat. Karena tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tapi para pelaku kebijakan juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan, dimana kemauan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh bentuk komunikasi yang dilakukan dan ketersediaan sumber daya.
 4. Perlu adanya penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah dimana Kelurahan Sawangbendar merupakan pusat tempat perbelanjaan dan kawasan pertokoan yang ada di Kecamatan Tahuna.
- Bogar,Romi.(2019).Manajemen Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Utara).Jurnal Eksekutif,3(3).
- dkk Hartono..2020.Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga.Malang:Literasi Nusantara.
- dkkLismawati.2021.PerilakuMasyarakat DalamPengelolaanSampah(Aa nalisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi).Indramayu:Penerbit Adab.
- Habsari,D Rizki.(2016).Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.Jurnal Ilmu Pemerintahan.4(1),282-293.
- M.Hardiansyah (2018),Bahaya Sampah Plastik Terhadap Ekosistem Laut,Analisa Daily.Mokodompis,Yulianto.(2019).Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado.Jurnal Eksekutif,3(3).
- Moleong,Lexy.2007.Methodologi Penelitian Kualitatif.Bandung:Remaja Karya.
- Nugroho,Riant.2021.Kebijakanpublik:implementasisidanPengendalian Kebijakan: Elex Media Komputindo.
- Patras D.M,Maihodi (2018),Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Perilaku Masyarakat Membuang Sampah di Tepi Pantai,Jurnal Sesebanua.

Daftar Pustaka

- Adinsyah,Nila Sarah.2021.Bahaya Limbah di Sekitar Kita.Surabaya:Media Edukasi Creative.
- Batahari,Tiarasary.(2020).Manajemen Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe).Jurnal Politic,9(2).

- Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar).Yogyakarta :Bintang Pustaka Madani.
- Purwanto,ErwanAgusSulistiyastuti,Dyah.2012.ImplementasiKebijakanPublik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia:Gava Media.
- Rahmawati,Norma.(2012).Mengurangi Sampah Bagian dari Investasi.Artikel.
- Riduan,Akhmad.2021.Penanganan dan Pengelolaan Sampah (Studi Implementasi Kebijakan).
- Riduan,Akhmad.2021.PenangananPengelolaan.Yogyakarta:BintangPustakaMadi.
- Riyanto.(2014).Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.Yogyakarta:Deepublish.
- Silalahi,Bernita, dan Mukhtar.2021.Penyebab Potensi Banjir Di Daerah Aliran Sungai Deli Kota Medan.Indramayu:Penerbit Adab.
- Silitonga,Dikson.2022.Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik.Banyumas:Zahira Media Publisher.
- Tinungki,Yeanneke.(2021).Pemberdayaan Perilaku Membuang Sampah Dan Penggunaan Sampah Plastik Di Kampung Beeng Laut Kecamatan Tabukan Selatan Tengah.Jurnal Ilmiah Tatengkorang,5(1).
- Wahab, A Solichin.2012.Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik.Jakarta:Bumi Aksara.
- Widiyanto,Agnes.(2017).ModelPengelolaanSampahRumahTanggaDiKabupaten Banyumas.Jurnal LPPM,7(1).
- Widodo, Joko.2007.Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. *rbukaan Informasi Publik*